

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MOJOKERTO PERIODE 2013-2017

Rubiyanto¹ & Rahayu²

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit

rubiyanto.mbe@gmail.com

Abstract

This research to examine influence Regional Tax and Regional Distribution toward Regional Expenditure in District of Mojokerto for Periode 2013-2017. This Research uses explanatory research methods with a quantitative approach. Data was prosessed using multiple linear regression analysis, Using data of Realized Local Government Budget Regional Tax, Regional Distribution, and Regional Expenditure. Hypotheses test used t-statistic and f-statistic at level significance 0,05. The result of this research show Regional Tax have significance toward Regional Expenditure with a significance level of 0,012, and Regional Distribution have significance toward Regional Expenditure with a significance level of 0,000. Simultaneously all variable have significance toward Regional Expenditure with a significance level of 0,000.

Key Word : Regional Tax, Regional Distribution, and Regional Expenditure

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja daerah. Uji hipotesis yang digunakan adalah t-statistik dan F-statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,012, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan sistem kepemimpinan di Indonesia, dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Sistem pemerintahan juga mengalami banyak

perubahan, hal ini terlihat dengan tidak diberlakukannya lagi sistem sentralisasi atas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diganti dengan sistem desentralisasi. Sesuai yang tertuang dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 yang

menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam UU nomor 23 tahun 2014 diamandemen dan disempurnakan dalam Undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang tugas dan wewenang kepala daerah, menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pada pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafudin, 2015). Sumber pendapatan daerah diantaranya adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan daerah sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangan daerah. Dalam keuangan pemerintah pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah, diantara yang termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh propinsi adalah pajak kendaraan bermotor,

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C (Salawali, 2015). Beban kewajiban pajak setiap entitas berbeda-beda bergantung pada tipe bisnis tersebut, beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini (pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode) dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode (Martani, 2015:246). Selain pajak daerah retribusi daerah juga merupakan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam APBD.

Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat balas jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai prestasi atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah. Pajak dan Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah. Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah Daerah, karena mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah (Hasanah, 2016:195) Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2015) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten Kudus, Syafrudin (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sedangkan retribusi berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Salawali (2015) dengan judul penelitian flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) serta pengaruhnya terhadap belanja daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk didalamnya pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Setiawan (2010), dalam penelitiannya dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) serta pengaruhnya terhadap belanja daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk didalamnya pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Sulistyono (2016) dalam penelitiannya dikatakan bahwa Pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013 -2017 ?
2. Apakah pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013 -2017 ?
3. Apakah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama

(simultan) terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013 - 2017 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013 - 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013 - 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2013-2017

Tinjauan Teori

Pengertian pajak

Menurut Kurniawan (2014) Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selanjutnya, Berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2016:3).

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan bersarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2013:229 Menurut Resmi (2017:8) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Peraturan Daerah tentang Pajak

Peraturan Daerah tentang pajak adalah sebagai berikut (Suandy, 2013:231) :

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut
3. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Nama, objek dan subjek pajak
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
 - c. Wilayah pemungutan
 - d. Masa pajak
 - e. Penetapan
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan
 - g. Kadaluarsa
 - h. Sanksi administrasi
 - i. Tanggal mulai berlakunya

4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu, pokok pajak, dan sanksinya,
 - b. Tata cara penghapusan piutang pajak dan kadaluarsa
 - c. Asas timbal balik
5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan
6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016:18). Menurut Ramlan (2016) retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Penerimaan Daerah

Menurut Syafrudin (2015) Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana

transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Kurniawan, (2014) menyatakan bahwa belanja di dalam APBD digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik
3. Belanja modal
4. Belanja Transfer

5. Belanja Tak Tersangka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 tahun 2014). Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Undang-Undang No.23 tahun 2014). Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri, baik dalam pembangunan fiskal maupun fisik di wilayahnya tersebut.

Hipotesis

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
 H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
 H3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian *explanatory*, yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari hubungan kausal antar variabel (variabel bebas dan variabel terikat) melalui pengujian hipotesis.

Hasil Analisis

Uji Deskriptif Data

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam statistik deskriptif berisi tentang jumlah sampel yang diteliti, nilai minimum dan maksimum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif diperuntukkan untuk mengetahui keadaan data secara umum sebelum dilakukan uji regresi maupun uji asumsi klasik.

Uji Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	54	2517500000.0 0	28581300000 00.00	38219633949 7.8704	69024071419 1.50460
X2	5	31925205919. 00	47942783681. 00	40609015601. 6000	5921032133.7 8538
Y	5	1693.00	3294.00	2450.6000	565.42648
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 2517500000 , jadi nilai terendah dari data pajak daerah yang diterima adalah Rp.

25.175.000 yaitu pajak sarang burung walet pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 28581300000.00 yang berarti bahwa perolehan pajak

daerah yang mencapai angka tertinggi dari tahun 2013-2017 adalah Rp. 28.581.300.000 yaitu perolehan dari pajak penerangan jalan di tahun 2017 dengan nominal yang telah dibulatkan. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp.3.821.963.394.97 dengan standar deviasi sebesar 6902407141.91. Variabel Retribusi Daerah data yang digunakan sebanyak 5 yaitu Retribusi Daerah yang diterima pada tahun , 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Variabel Retribusi Daerah (X2) menunjukkan nilai minimum 31.925.205.919,00 yang artinya adalah dari data retribusi daerah tahun 2013-2017 jumlah minimum retribusi yang diterima daerah adalah Rp. 31.925.205.919,02. Nilai maksimum retribusi daerah adalah 47.942.783.681,00 atau Rp.

47.942.783.681 yang dicapai pada tahun 2017. Sedangkan nilai rata-rata dari variabel ini adalah 40640954057 atau Rp. 40.640.954.057 dengan standar deviasi sebesar 5.921.032.133,78.

Variabel Belanja daerah (Y) untuk tahun 2013-2017 memiliki nilai minimum sebesar 1.693.00 (dalam triliun) atau Rp. 1.693.112.375.766,77 yang diperoleh pada tahun 2013, dan nilai maksimalnya adalah 3294.00 (dalam triliun) atau Rp.3.294.052.008.942,59 yang diperoleh pada tahun 2017. Sedangkan nilai rata-rata data yang dikumpulkan adalah 246,6296 (dalam triliun) atau Rp. 2.466.296.000.000,00 dengan standar deviasi sebesar 565.42648 dan nilai N = 5 yaitu data Belanja Daerah tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.509	.490	403.92068

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil perhitungan diatas tersebut bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,509 atau 51 %, artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen Belanja

Saham yaitu sebesar 51% , dan selebihnya sebesar 49% dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel Uji normalitas

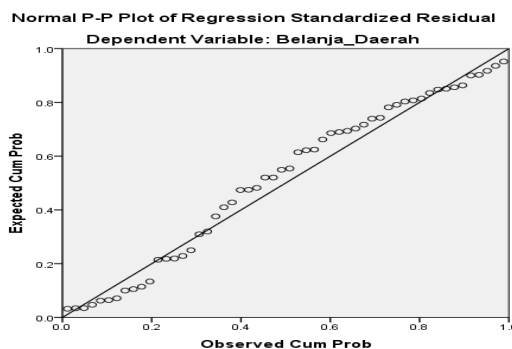
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07924063
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.075
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Uji Normalitas dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov residual diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,20, dari hasil ini dapat diketahui dan diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini

berdistribusi normal karena nilai signifikansinya $> 0,05$. Maka data pada penelitian ini dapat dilanjutkan untuk diuji menggunakan regresi linear berganda. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik normalilitas dibawah ini:

Grafik Normalitas



Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Pada grafik tersebut terlihat sebaran titik data normal mendekati garis, ini menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang

kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan *Tolerance*, nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*,

serta nilai standar *error* koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF(*Variance Inflation Factor*) > 10. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian multikolinearitas pada penelitian ini :

Uji Multikoleniaritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-160.676	385.112		-.417	.678		
Pajak_Daerah (X1)	2.107E-10	.000	.257	2.619	.012	.999	1.001
Retribusi_Daerah (X2)	6.262E-8	.000	.656	6.677	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Tabel diatas menunjukkan bahwa standar error kurang dari satu, yaitu X1= 0,000 dan X2=0,000, serta nilai koefisien beta juga kurang dari satu dimana X1=0,257 dan X2=0,656. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai standar error rendah dan multikolinearitas tidak terdeteksi. Hal ini diperkuat juga dengan

hasil nilai *tolerance* lebih dari 0,01 yaitu 0,999 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,001. Seperti yang telah disyaratkan diatas bahwa multikoleniaritas akan terjadi bila nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa gejala multikoleniaritas tidak terjadi dalam model regresi sehingga hasil pengujian dikatakan *reliable* atau terpercaya.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.713 ^a	.509	.490	403.92068	1.650

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

b. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel diatas tersebut diketahui nilai d/DW adalah 1,650, sesuai dengan tabel Durbin Watson maka dU = 1,638 dan dL= 1,4851 dengan N=54 serta

jumlah variabel bebas (k)=2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai d terletak diantara dU dan 4-dU yaitu 1,638 < 1,650 < 4-1,638, oleh sebab itu Ho diterima

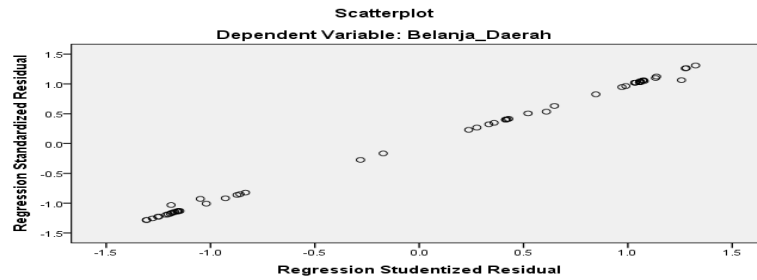
yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji ini digunakan agar model regresi yang kita gunakan tidak bias.

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian autokorelasi pada penelitian ini :



Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Dari gambar grafik *Scatter Plott* pada gambar terlihat bahwa penyebaran data dari waktu ke waktu selalu konsisten. Kondisi data dalam sebaran ini disebut homoskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini

terbebas dari masalah heteroskedastisitas yang dapat mengganggu dalam persamaan linier yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Pajak_Daerah	Retribusi_Daerah	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pajak_Daerah	Correlation Coefficient	1.000	.107	.008
		Sig. (2-tailed)	.	.442	.952
		N	54	54	54
	Retribusi_Daerah	Correlation Coefficient	.107	1.000	-.020
		Sig. (2-tailed)	.442	.	.883
		N	54	54	54
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.008	-.020	1.000
		Sig. (2-tailed)	.952	.883	.
		N	54	54	54

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dari kedua variabel independen, yaitu untuk variabel pajak daerah diperoleh nilai signifikansi 0,952 dan variabel retribusi daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,883. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada uji regresi karena data yang digunakan bersifat homoskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi dan dihitung menggunakan program SPSS. Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda :

Hasil Penghitungan Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-160.676	385.112		-.417	.678
Pajak_Daerah	2.107E-10	.000	.257	2.619	.012
Retribusi_Daerah	6.262E-8	.000	.656	6.677	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Dari tabel diperoleh nilai konstanta sebesar -160,676 (negatif) mempunyai arti bahwa semakin tinggi perolehan sebesar 6,262, dari informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perolehan Retribusi Daerah atau jika terjadi

peningkatan pada Retribusi Daerah sebesar 1 tingkatan maka terjadi kenaikan Belanja Daerah sebesar 6,262 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -160,676 + (2,107)X_1 + (6,262)X_2 + e$$

Nilai b_1 merupakan koefisien regresi dari variabel X_1 (Pajak Daerah) sebesar 2,107 (positif) mempunyai arti bahwa semakin tinggi perolehan Pajak Daerah atau jika terjadi peningkatan pada Pajak Daerah sebesar 1 tingkatan maka terjadi kenaikan Belanja Daerah sebesar 2,107 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai b_2 merupakan koefisien regresi dari variabel X_2 (Retribusi Daerah)

Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji t :

Uji Parameter Individual (Uji-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-160.676	385.112		-.417	.678
	Pajak_Daerah	2.107E-10	.000	.257	2.619	.012
	Retribusi_Daerah	6.262E-8	.000	.656	6.677	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Data diolah penulis dengan SPSS Versi 22

Dari analisis regresi pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini terlihat pada nilai sig.t yang didapat keduanya dibawah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05.

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan adalah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dari hasil penelitian koefisien regresi pada tabel diatas untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,619 dan t-tabel 2,005 dengan taraf kesalahan 0,05. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel dan signifikansi variabel adalah $0,012 < 0,05$ maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan adalah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dari hasil penelitian koefisien regresi pada tabel untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6,677 dan t-tabel 2,005 dengan taraf kesalahan 0,05. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel dan signifikansi variabel adalah $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F) :

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8623728.911	2	4311864.455	26.429	.000 ^b
	Residual	8320747.682	51	163151.915		
	Total	16944476.59	53			
		3				

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

Berdasarkan tabel uji ANOVA (*Analysis of Varians*) atau uji F tersebut, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 26,429 sedangkan F-tabel sebesar 2,779 dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga F-hitung sebesar $26,429 > 2,779$ F-tabel dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, hal ini terbukti dari hasil perhitungan regresi bahwa untuk Variabel Pajak Daerah memperoleh nilai t-hitung sebesar $2,619 > 2,005$ t-tabel, hal ini diperkuat pula oleh hasil signifikansi $0,012 < 0,05$. Variabel ini memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, maksudnya ketika pajak Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika Pajak Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun. Hal ini terlihat pada nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_1 (Pajak Daerah) sebesar 2,107

(positif) mempunyai arti bahwa semakin meningkat Pajak Daerah (X_1) maka akan meningkat pula Belanja Daerah (Y) dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu oleh Syafrudin (2015) yang memberikan temuan empiris bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Salawali (2015) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya termasuk Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

1. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017.

Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, hal ini terbukti dari hasil perhitungan regresi bahwa untuk Variabel Retribusi Daerah memperoleh nilai t-hitung sebesar $6,677 > 2,005$ t-tabel, hal ini diperkuat pula oleh hasil signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel ini memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, maksudnya ketika Retribusi Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami penurunan. Begitupun

sebaliknya jika Retribusi Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun. Hal ini terlihat dari nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_2 (Retribusi Daerah) sebesar 6,262 (positif) mempunyai arti bahwa semakin meningkat Retribusi Daerah (X_2) maka akan meningkat pula Belanja Daerah (Y) dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu oleh Setiawan (2010) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya termasuk Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan uji ANOVA (*Analysis of Varians*) atau uji F tersebut, menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$, maka H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keduanya secara bersama-sama mempengaruhi besar kecilnya Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu oleh Setiawan (2010) menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Salawali (2015) yang juga menyatakan bahwa Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola James And Asiweh Moses (2012), *Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria*, *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 8, pp.99-110.
- Adebisi, J and Gbegi (2013), *Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria*, *American Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 1, No. 3, 2013, pp. 125-134.
- Amran, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2015), Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh), *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 4, Hal. 1-10.
- Bird Richard M (2015), *Improving Tax Administration in Developing Countries*, *Journal of Tax Administration* Vol.1:1, pp.23-30.
- Dwi Martani, dkk (2015), *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Salemba Empat, Jakarta.
- Gale William G (2014), *Effects of Income Tax Changes on Economic Growth*, *International Journal of Business and Social Science* Vol. 1 No. 3, pp.1-10.
- Hadi Sutrisno (2015), *Statistik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Handayani Sri Putri, Syukriy Abdullah, dan Heru Fahlevi (2015), Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, *Jurnal Magister Akuntansi, Volume 4, No.2, Hal. 45-50*.
- Hartati Neneng (2015), *Pengantar Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hasanah Nurmala dan Fauzi Ahmad (2016), *Akuntansi Pemerintahan*, In Medika, Jakarta.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, dan Dwirandra (2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi, *Jurnal Akuntansi, Volume 7, No.1, Hal. 79-92*.
- Kurniawan Audi (2014), Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah Serta Pendapatan Lain-Lain dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Publik Kota Metro, *Jurnal Akuntansi, Volume 3, No.1, Hal.1-10*.
- Lubis, Arfan Ikhsan (2014), *Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2016*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Nugroho Fajar (2012), Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Permadi, Dwi Angga (2013), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Ramlan, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh), *Jurnal Magister Akuntansi, Volume 5, No.2, ISSN 2302-0164, Hal.79-88*.
- Resmi Siti (2017), *Perpajakan Teori dan kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Salawali Wiwin anggriani, Paulus Kindangen dan Agnes Lapian (2015), *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, *Jurnal akuntansi, Volume 18, No.2, Hal. 1-10*.
- Setiawan Anjar (2010), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi, Volume 1, No. 1, Hal.6-15*.
- Suandy Erly (2013), *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono (2015), *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sularno, Fitria Megawati (2013), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian anggaran Belanja

- Modal, *Skripsi*, Universitas Widyatama Bandung.
- Sulistyo Sigit Hanafi (2016), Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Syafrudin Ahmad (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2004 – 2013, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.
- Veronika Baranová (2012), *Taxation of Corporations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Countries*, *Journal of Competitiveness*, Vol. 4, Issue 4, pp. 96-108, pp. 96-108.